

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN PREDIKSI PAJAK
PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Benedictus Bromo Aji

NIM : 052114135

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN PREDIKSI
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Benedictus Bromo Aji

NIM : 052114135

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

**KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN
PREDIKSI PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh :

Benedictus Bromo Aji

NIM : 05114135

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, SE.,M.Si, QIA.

Tanggal : 29 November 2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN PREDIKSI PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Benedictus Bromo Aji

NIM : 052114135

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 20 Desember 2010

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA

Anggota Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si, QIA.

Anggota A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA

Anggota Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

Yogyakarta, 30 Desember 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

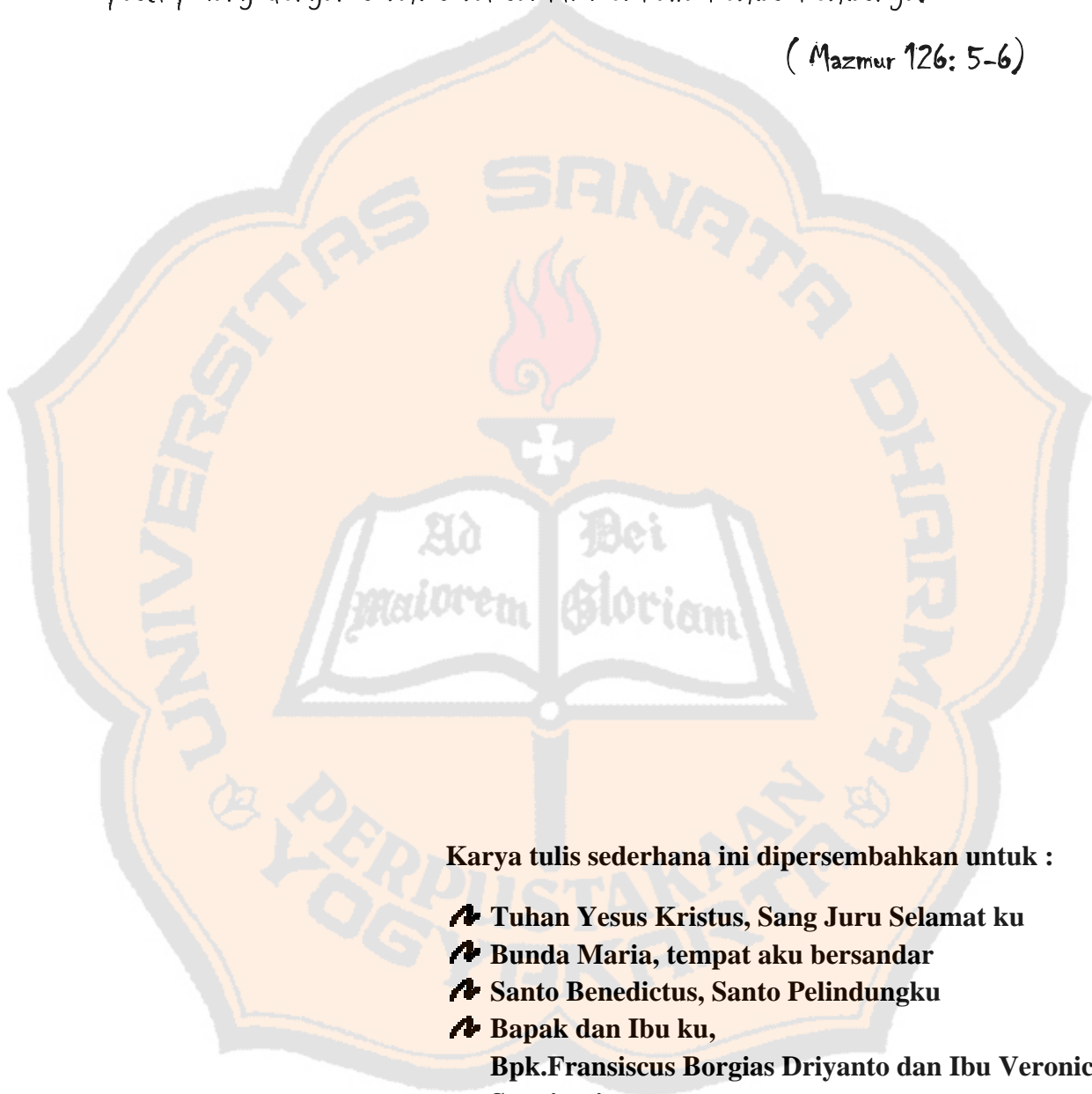


Drs. TP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“ Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata akan menuai dengan sorak – sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.”

(Mazmur 126: 5-6)



Karya tulis sederhana ini dipersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ku
- Bunda Maria, tempat aku bersandar
- Santo Benedictus, Santo Pelindungku
- Bapak dan Ibu ku,
Bpk.Fransiscus Borgias Driyanto dan Ibu Veronica Supriyati
- Kakak ku
Emilia Wuryansari dan Aloysius Hendri Indrianto
- Masa depanku yang akan datang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “ Kontribusi, Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun, dan Prediksi Pajak Penerangan Jalan Umum (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Desember 2010 adalah karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk ringkasan kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain yang saya aku seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 20 Desember 2010

Yang membuat pernyataan,

Benedictus Bromo Aji

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Benedictus Bromo Aji

NIM : 052114135

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN PREDIKSI PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK DAERAH** Studi Kasus pada **Pemerintah Kabupaten Sleman** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2010

Yang menyatakan,



Benedictus Bromo Aji

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Kontribusi, Perbandingan dari tahun ke tahun, dan Prediksi Pajak Penerangan Jalan Umum studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Dr.Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma
4. Firma Selistiyowati, S.E., M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan pencerahan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. MT. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si.,Akt.,QIA selaku dosen pembimbing akademik selama menimba ilmu di kampus ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang saya hormati
7. Sri Nurhidayah, S.Si, MT selaku Ka. Sub Bid. Lidbang BAPPEDA Kabupaten Sleman yang telah membuatkan ijin penelitian di Kabupaten Sleman
8. H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si., kepala bidang pendapatan DPKKD Kabupaten Sleman yang telah memberikan data dan informasi skripsi ini dan memberikan semangat dalam menyelesaikan.
9. Bapak Heru selaku staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman yang telah membantu mencarikan undang-undang yang mendukung.
10. Kedua Orangtuaku tercinta : Bpk Fransiskus Borgias Driyanto dan Ibu V. Supriyati, atas dukungan moril, materiil, doa, dan kasih sayang kepada penulis yang telah diberikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan
11. Kakakku Emilia Wuryansari dan Kakak iparku Aloysius Hendri Indrianto, atas dukungan moril dan materiil.
12. Sahabat-sahabatku : Martinus Aris Munandar Priambogo ,S.E., Ria Puspitasari, FX. Nur Widhi Nugroho, Stefanus Karl Christian, bukan suatu kebetulan, melaikan kehendah Tuhan aku berjumpa dengan kalian, tawa, canda, duka, dan air mata selalu megiringi langkah kita. Apa yang telah kita lalui biarlah menjadi cerita klasik untuk masa depan.
13. Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani, atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
14. Josephin Swesti Tika Sari, atas dukungan dan doa yang pernah diberikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15. Teman-Teman Akuntansi : Alul” Deviarta Pamungkas”, Benhard, A.Cahyo Teguh, Agung Wahyudi, Nova Arie wibawa, Danang Priambogo, Albertus Fani, Noel, Yustinus Dhani, Rino, Yudha, Hara, Tyas, Hafid, Bernadus Nova, Cicus, Lorita, Lisa, dan (Alm) Cristina Yuli Kusuma Sari.
16. Teman teman MPT seangkatan, terimakasih atas kerjasama yang telah diberikan.
17. Teman-teman Mudika Santo Venantius Dukuh, atas dukungannya yang telah diberikan.
18. Teman-teman juru parkir R.M. Jejamuran, atas dukungannya yang telah diberikan.
19. Semua pihak yang belum dapat disebutkan satu per satu.Mohon maaf dan terimakasih atas dukungannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap sembangsih berupa kritik dan saran dalam proses pembelajaran.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis

Benedictus Bromo Aji

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

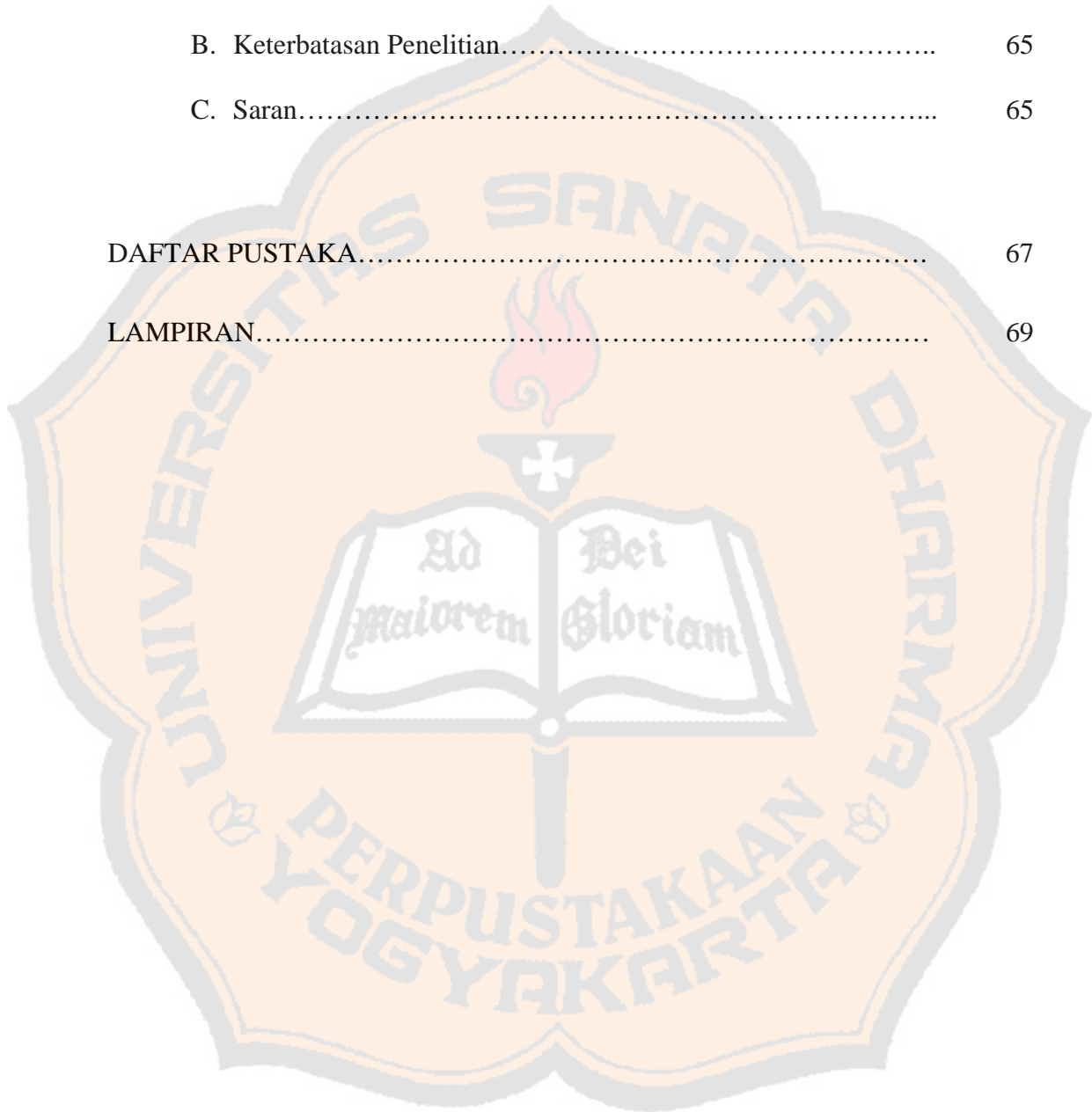
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	9
4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	10
5. Kedudukan Hukum Pajak.....	12
6. Pengelompokan Pajak.....	13
7. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14
B. Pajak Daerah.....	16
1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	16
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	17
C. Pajak Penerangan Jalan Umum.....	20
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan Umum.....	20
2. Subyek Pajak Penerangan Jalan Umum.....	20
3. Obyek Pajak Penerangan Jalan Umum.....	21
4. Dasar Penerangan Pajak Penerangan Jalan Umum.....	21
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan Umum.....	22
6. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Umum.....	22
7. Proses Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum.....	23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Angka Indeks.....	23
1. Pengertian Angka Indeks.....	23
2. Tujuan angka Indeks.....	23
3. Macam-macam Angka Indeks.....	25
4. Angka Indeks Berantai.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	34
A. Sejarah Kabupaten Sleman.....	34
B. Visi dan Misi.....	36
C. Keadaan Geografis.....	38
D. Penduduk.....	40
E. Pendidikan.....	42
F. Matapencaharian.....	45
G. Agama dan Kepercayaan.....	46
H. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.....	47
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	48
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	51
C. Kontribusi PPJU terhadap Pajak Daerah.....	51
D. Perbandingan dari tahun ke tahun PPJU.....	54
E. Prediksi Pendapatan PPJU.....	57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan Penelitian.....	65
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

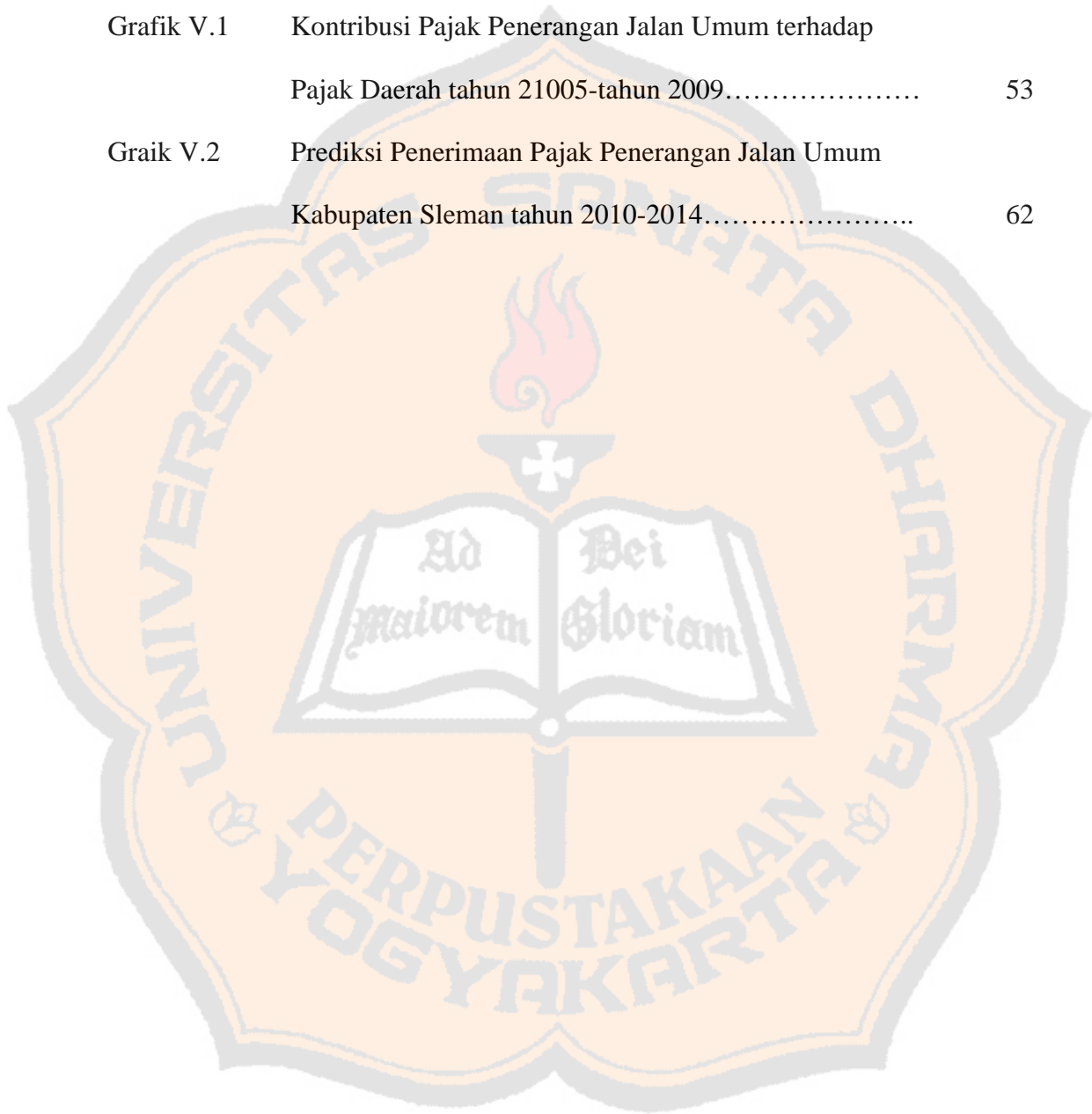
DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kecamatan.....	38
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan.....	40
Tabel V.1	Target dan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman tahun 2005 – tahun 2009.....	48
Tabel V.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2005-tahun 2009.....	50
Tabel V.3	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2005-tahun 2009.....	53
Tabel V.4	Angka Indeks Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2005-tahun 2009.....	57
Tabel V.5	Perhitungan <i>Trend</i> Pajak Penerangan Jalan Umum.....	59
Tabel V.6	Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman tahun 2010-2014.....	61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GRAFIK

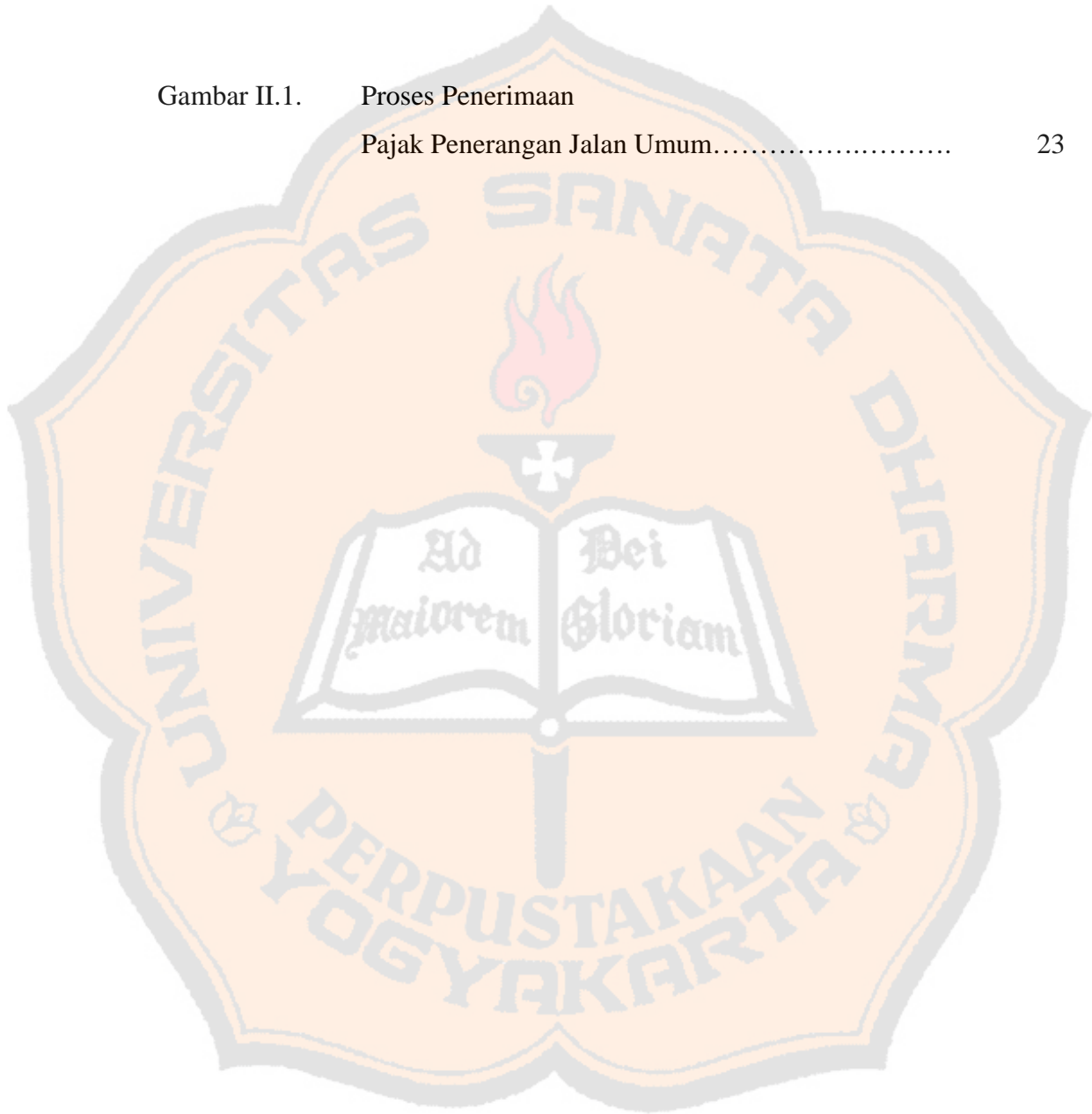
	Halaman
Grafik V.1	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah tahun 21005-tahun 2009..... 53
Graik V.2	Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman tahun 2010-2014..... 62



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1.	Proses Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum.....	23
--------------	---	----



ABSTRAK

**KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN PREDIKSI
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PAJAK DAERAH
(Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**

**Benedictus Bromo Aji
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010**

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui, (1) kontribusi atau sumbangsih, pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009, (2) perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 (3) Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan umum untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan (1) analisi kontribusi digunakan untuk menjawab masalah pertama yaitu seberapa besar kontribusinya pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah (2) analisis indeks berantai digunakan untuk menjawab masalah yang kedua yaitu bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan pajak penerangan jalan umum selama tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009, (3) analisis trend digunakan untuk menjawab masalah terakhir yaitu prediksi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 46,90%, pada tahun 2006 sebesar 49,11% pada tahun 2007 51,11% pada tahun 2008 sebesar 44.11% dan pada tahun 2009 sebesar 43,90%. (2) perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan pajak penerangan jalan umum terus mengalami perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. (3) prediksi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2010 sebesar Rp34.814.254.235,8, tahun 2011 sebesar Rp38.442.017.907,8, tahun 2012 sebesar Rp42.069.781.579,8 tahun 2013 sebesar: Rp.45.697.545.251,8, dan tahun 2014 sebesar Rp 49.325.308.928,8

ABSTRACT

**CONTRIBUTION, YEAR TO YEAR COMPARISON
AND PREDICTION OF PUBLIC STREET LIGHTING TAX TO REGIONAL TAX.
(A case study in Sleman Regency Government)**

**Benedictus Bromo Aji
052114135
Sanata Dharma University**

The aims of this research were to determine (1) The contribution of public street lighting tax to regional tax in Sleman Regency from The buget year of 2005 to budget year of 2009, (2) Year to year Comparison of public street lighting tax revenue in Sleman Regency for the budget year of 2005 to 2009, (3) Prediction of public street lighting tax revenue for the budget year of 2010 to 2014.

The type of this research was case study in Sleman Regency Government. The data gathering techniques used were interview and documentation. The data analyzing techniques used were (1) Contribution Analysis used to answer the first problem, which was how much the contribution of public street lighting tax to regional taxes, (2) Chain Index Analysis used to answer the second problem, which was year to year comparison from year to year of public street lighting tax revenue during the budget year of 2005 to 2009, (3) Trend Analysis used to answer the last problem, which was the prediction of public street lighting tax revenue to regional tax in Sleman regency budget year of 2010 to 2014.

The results of this study indicated that (1) The contribution of public street lighting tax to regional tax tended to increase, 46.90% in 2005, 49.11% in 2006, 51.11% in 2007, 41.11% in 2008, and 43.90% in 2009. (2) Year to year Comparison of public street lighting tax revenue continued to increase. (3) The prediction of public street lighting tax revenue for 2010 was Rp34.814.254,8, in 2011 was Rp38.442.017.907,8, in 2012 was Rp42.069.781.579,8, in 2013 was Rp45.697.545.251,8, and in 2014 was Rp49.325.308.928,8.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, membawa implikasi pada roda pemerintahan di daerah. Melalui Undang-Undang ini, banyak jenis wewenang yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Prinsip yang mendasari kewenangan tersebut adalah berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal yang sangat berperan penting di dalam mendukung keberhasilan daerah adalah masalah pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Pajak daerah memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan daerah, Di Kabupaten Sleman memiliki tujuh jenis pajak daerah

diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Bahan Galian Golongan C. Dari ketujuh pajak daerah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak penerangan jalan.

Di jaman modern seperti saat ini penerangan jalan merupakan kebutuhan semua masyarakat, salah satunya masyarakat Sleman. Penerangan jalan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terutama untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir tindakan kriminalitas. Dasar Pengean Pajak adalah nilai Jual Tenaga Listrik yang dipakai oleh perumahan (non industri) maupun industri. Tarif pajak 8% (delapan perseratus) dikenakan untuk non industri dan tarif 10% (sepuluh perseratus) untuk industri.

Dari tahun ke tahun Pajak Penerangan Jalan memberikan sumbangan yang selalu meningkat seperti pada laporan APBN Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2002 sampai dengan 2006 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp9.810.399.740,00. Tahun anggaran 2003 penerimaan Pajak Penerangan Jalan naik menjadi Rp11.831.921.870,00 atau meningkat sebesar Rp2.021.522.130,00 dari tahun sebelumnya. Di tahun 2004 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menjadi Rp12.787.591.248,00 atau naik sebesar Rp955.669.370,00 dari tahun 2003 , tahun anggaran 2005 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp17.185.835.745,00 , dan tahun 2006 penerimaan Pajak Penerangan

Jalan sebesar Rp18.652.038.103,00. dan dapat dipastikan penerimaan itu akan selalu mengalami peningkatan karena pesatnya pembangunan di Kabupaten Sleman, dari meningkatnya pembangunan maka permintaan untuk permohonan pemasangan listrik juga meningkat.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, maka untuk mengembangkan penelitian dapat disampaikan rumusan masalah yaitu :

1. Berapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2009 ?
2. Bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Sleman selama tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 ?
3. Bagaimana prediksi penerimaan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui berapa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005-2009 pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui perbandingan pendapatan Pajak Penerangan Jalan umum dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Mengetahui berapa prediksi pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mempertahankan dan usaha meningkatkan pendapatan Pajak Daerah terutama dari sektor penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun sebuah skripsi yang baik sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai kontribusi dan prediksi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di wilayah Kabupaten Sleman.

3. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik, terutama mengenai kontribusi dan prediksi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman dan sejauh mana ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diterapkan di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung tentang terlaksananya penelitian, yaitu meliputi dasar-dasar perpajakan, pengertian pajak daerah, kebijakan akuntansi keuangan daerah, mengenai pengertian umum Pajak Penerangan Jalan

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Kabupaten Sleman, lokasi dan luas wilayah, jumlah penduduk, pendidikan, matapencaharian, agama dan kepercayaan.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan diskripsi data dan penghitungan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Penerangan Jalan,

kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah, Perkembangan dan Prediksi Pajak Penerangan Jalan. Perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan saran kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

menurut Soemitro dalam Mardiasmo

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2008: 1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berarti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah Negara.
- b. Berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang berarti pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk yang berarti bahwa jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan Negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

(Mardiasmo, 2008: 1)

Menurut Adriani dalam Zain

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(Zain, 2005: 10)

2. Fungsi pajak

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

(Mardiasmo, 2008: 1- 2)

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Syarat keadilan berarti pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Mardiasmo, 2008: 2-3)

4. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah : (Mardiasmo, 2008: 3)

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1). Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2). Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk negara.

5. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu (Mardiasmo, 2008: 4)

a. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menawarkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak penghasilan

b. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan yang menimbulkan utang pajak serta kewajiban pajak untuk mengajukan keberatan dan banding.

6. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 5-6) pengelompokan pajak dibagi menurut :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyek, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2). Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

Daerah terdiri atas :

- (1) Pajak Daerah Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

(Mardiasmo, 2008: 6-8)

a. Stelsel Pajak

Pemungut pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- 1). Stelsel nyata (*riil stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata).
- 2). Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3). Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1). Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2). Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3). Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Ciri-ciri Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
- b. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan jenis pajak daerah yang dipungut.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

- f. Pajak bersifat dapat dipaksakan, karena apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka ia akan dikenakan sanksi baik itu pidana maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah adalah :

- a. Pajak provinsi, terdiri atas :
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas :
- 1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya

yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan menguji suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

7) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

C. Pajak Penerangan Jalan Umum

1. Pengertian Pajak penerangan Jalan Umum

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan Umum adalah; pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.11 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan Umum adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik . Adapun pengelola pajak penerangan jalan umum adalah DPKKD (Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) bidang pendapatan, penunjukan tugas tersebut tertuang pada Surat Keputusan Bupati Sleman No.56/SK.KDH/A/2004, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2002. Dan bekerja sama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai pemungut pajak.

2. Subyek pajak penerangan jalan umum

Subyek pajak penerangan jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

3. Obyek pajak penerangan jalan umum

Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik, penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN

- 1) Pengecualian obyek pajak penerangan jalan umum
 - a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
 - c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - d) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan kepentingan sosial.

4. Dasar Pengenaan Pajak penerangan jalan umum

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang dipakai.

5. Tarif Pajak Penerangan Jalan Umum

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 % (delapan persen), dan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

6. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Umum

Nilai pajak penerangan jalan umum diperoleh dari hasil perhitungan nilai jual tenaga listrik yang digunakan dikalikan tarif. Ada dua jenis perhitungan pajak penerangan jalan yaitu :

- 1) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Umum untuk non industri

$$PPJU \text{ non industri} = \text{nilai KWH} \times \text{kriteria tarif (R)} \times 8\%$$

Kriteria tarif (R) adalah jenis tarif rumah tangga yang dikenakan, berdasarkan daya. Ada tiga jenis kriteria yaitu R1 untuk rumah tangga yang memiliki daya 450 VA sampai dengan 2200 VA, R2 untuk rumah tangga yang memiliki daya 3500 VA sampai dengan 5500 VA, dan R3 untuk rumah tangga yang memiliki daya 6600 VA ke atas.

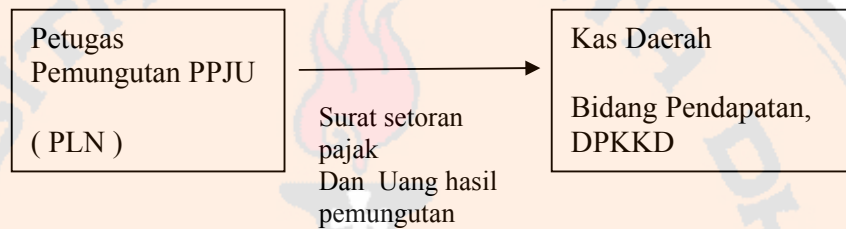
- 2) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Umum untuk industri

$$PPJU \text{ industri} = [(\text{nilai KWH} \times \text{tarif}) \times 30\%] \times 10\%$$

Untuk mencari nilai pajak penerangan jalan umum untuk industri, nilai KWH hanya tiga puluh persepuluh dari keseluruhan total nilai KWH industri tersebut dan dikalikan sepuluh perseratus.

Adapun jenis tarif yang dikenakan yaitu, B1 untuk industri yang memiliki daya 450 VA sampai dengan 5500 VA, B2 untuk industri yang memiliki daya 6600 VA sampai dengan 200 KVA, dan B3 untuk industri yang memiliki daya diatas 200 KVA.

7. Proses penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman



Gambar II.1: Proses Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Sumber Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman merupakan pajak daerah yang dikelola DPKKD bidang pendapatan,

Dari gambar diatas, terlihat bahwa proses penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum berawal dari pemungutan yang dilakukan oleh PLN sebagai pihak teknis pemungutan pajak tersebut dan pada periode tertentu melakukan penyetoran pajak kepada kas daerah disertai surat pemungutan yang disampaikan pada kepala bidang pendapatan atas hasil pungutan yang dilakukan.

D. Angka Indeks

1. Pengertian angka indeks

Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda

(Supranto, 2008: 291).

Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar (*base period*) dan waktu bersangkutan atau sedang berjalan (*current period*). Waktu dasar (*base period*) adalah waktu di mana suatu kegiatan (kejadian) dipergunakan sebagai dasar perbandingan, sedangkan waktu yang bersangkutan (*current period*) adalah waktu di mana suatu kegiatan (kejadian) digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan (kejadian) pada waktu dasar. Tahun dasar dalam perhitungan angka indeks diberi nilai 100%. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih tahun dasar, yakni (Boedijoewono, 2007: 173) :

- a) Tahun dasar yang dipilih sebaiknya menunjukkan keadaan normal atau keadaan ekonomi yang stabil, karena tahun dasar dinilai 100%.
- b) Tahun dasar yang dipilih jangan terlalu jauh dibelakang, paling lama sepuluh tahun atau lebih baik kurang dari lima tahun, sehingga tidak jauh dari tahun yang akan dihitung angka indeksnya.

2. Tujuan angka indeks

Maksud dari pembuatan angka indeks adalah

- a) Tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan (Supranto, 2008: 291).
- b) Untuk membandingkan perkembangan dari suatu periode ke periode lain (Boedijoewono, 2007: 172).

3. Macam-Macam Angka Indeks

Ada tiga macam angka indeks utama pada ilmu ekonomi yaitu (Boedijoewono, 2007: 171) :

a). Angka Indeks Harga (*Price Index*)

Angka indeks harga ini sangat banyak digunakan di bidang ekonomi.

Angka indeks harga menunjukkan perubahan harga dari satu periode ke periode lain

b) Angka Indeks Kuantita (*Quanty Index*)

Angka indeks kuantita menunjukkan perubahan kuantita dari satu periode ke periode lain, misalnya perkembangan jumlah penjualan, jumlah produksi dan sebagainya.

c) Angka Indeks Nilai (*Value Indeks*)

Angka indeks nilai menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lain. Nilai ini dapat diperoleh dari hasil perkalian antara harga dan kuantita.

4. Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*)

Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*) adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar atau periode sebelumnya sebagai dasar perhitungannya (Santoso dan Hamdani, 2007: 179).

Angka indeks berantai tidak memakai suatu tahun dasar atau waktu dasar yang tetap namun berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya. Mengingat bahwa angka indeks berantai ini ditentukan berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya, maka dari deretan indeks ini lebih mudah mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu yang berurutan.

Angka indeks berantai dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{t-t-1} = \frac{Q_t}{Q_{t-1}} \times 100\%$$

Angka indeks berantai mempunyai keunggulan sebagai berikut (Boedijoewono, 2007: 194-195):

- a. Angka indeks berantai dapat membandingkan nilai relatif sekarang dengan nilai relatif pada tahun atau periode sebelumnya.

- b. Dengan angka indeks berantai kita mudah memasukkan adanya unsur-unsur baru dan mengeluarkan unsur-unsur yang lama yang dianggap tidak diperlukan lagi tanpa merubah seluruh perhitungannya.
- c. Dengan angka indeks berantai kita selalu dapat menyesuaikan faktor penimbangannya (*weight*) pada setiap keadaan yang kita inginkan.
- d. Perhitungan angka indeks berantai ini dapat menghindarkan adanya pengaruh variasi musim.

Selain keunggulan-keunggulan di atas angka indeks berantai juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat digunakan untuk dapat mengadakan perbandingan dalam jangka panjang, karena perbandingan dalam jangka panjang dengan persentase akan menjadi kurang bermanfaat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah kabupaten Sleman. Studi kasus adalah suatu penelitian terhadap obyek tertentu, pada waktu tertentu dan hasilnya merupakan gambaran lengkap dan pengumpulan datanya berdasarkan pada obyek penelitian, hasilnya berlaku pada obyek yang diteliti dan hasil kesimpulannya tidak dapat digeneralisasikan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil hanya berlaku bagi obyek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di DPKKP (Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Sleman Yogyakarta

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2010.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang obyek penelitian. Sehubungan dan hal itu, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah DPKKD, Bidang Pendapatan Kabupaten Sleman.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum sebagai salah satu sumber komponen pajak daerah.

D. Data yang Diperlukan

1. Data mengenai gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
3. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta mengolah data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan secara langsung pada responden.

F. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti mendapatkan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau badan.

G. Teknik Analisis Data

1. Menghitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2009

Untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah, digunakan data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum tahun tertentu dan data realisasi penerimaan pajak daerah tahun tertentu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah kabupaten Sleman adalah :

$$\text{Kontribusi PPJU} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Menghitung perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan umum dari tahun ke tahun

Menghitung perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum, digunakan Analisis Indeks Berantai, (Boedijoewono, 2007: 193) dengan rumus sebagai berikut :

Angka Indeks Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

$$= \frac{\text{Jumlah Penerimaan PPJU Tahun Dicari}}{\text{Jumlah Penerimaan PPJU Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan angka indeks ini dapat dilihat perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan umum dalam bentuk prosentase dari tahun ke tahun, selama tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009. Tahun 2005 dijadikan tahun dasar (*base year*) dan diberi nilai 100 % artinya tahun itu dianggap dalam keadaan normal.

3. Menghitung prediksi penerimaan Pajak Penerangan Jalan umum (PPJU) Kabupaten Sleman untuk Tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014

Untuk menemukan prediksi penerimaan pajak penerangan jalan umum menggunakan analisis trend. *Trend* adalah suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi maupun peramalan pada masa mendatang (Saleh, 2004: 157)

Adapun jenis *trend* yang dipakai adalah metode *least square's* (jumlah kuadrat terkecil) dengan rumusan sebagai berikut :

$$Y' = a + b X$$

Di mana :

Y' = Nilai variabel dependent yaitu Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum

X = Tahun tertentu

a = Jumlah Y pada saat $X = 0$

b = Jumlah kenaikan/penurunan pajak penerangan jalan umum per tahun

Didalam metode *least square's* (jumlah kuadrat terkecil) nilai a dan b dapat diperoleh dengan rumusan sebagai berikut

a. Menentukan nilai a dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y}{N}$$

Di mana :

a : Jumlah Y pada saat $X=0$

Y : Jumlah realisasi PPJU

N : Jumlah tahun yang akan diprediksi yaitu selama 5 tahun mulai tahun anggaran 2010 s/d tahun anggaran 2014

b. Menentukan nilai b dengan rumus

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Di mana

b = Jumlah naik / turun Y per tahun atau jumlah naik / turun PPJU per tahun

X = Jarak antar tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah

c. Menentukan persamaan garis *trend* dengan rumus

$$Y' = a + bX$$

Dimana

Y' = nilai *trend* Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

BAB IV
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman

Sejarah berdirinya Kabupaten Sleman memiliki riwayat yang panjang dan bahkan telah tampil dalam panggung sejarah sejak masa prasejarah. Semua itu ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti temuan benda cagar budaya periode prasejarah yang berupa batu lumping, batu dakon dan batu pipisan di beberapa situs, misalkan di Balecatur, Gamping, Godean, Moyudan, Sayegan, Cangkringan, Kalasan, Tempel, Turi, Pakem, Berbah dan Ngaglik. Dilihat dari tinggalan budaya tersebut dapat diduga bahwa pendukung budaya kawasan itu kehidupannya bertani. Keadaan geografisnya dan tersedianya bahan untuk keperluan pertanian di wilayah Sleman pada masa prasejarah membuktikan bahwa sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal serta tersebar di berbagai tempat. Sedang bentuk atau pola pertanian yang mereka kerjakan masih belum dapat diperoleh petunjuk yang pasti, namun dari studi banding dengan wilayah lain dapat diperoleh gambaran bahwa sistem pertanian yang mereka kerjakan adalah peladangan dan sistem persawahan.

Pada waktu itu mengenai nama Sleman diperoleh menurut hipotesa Purbatjaraka berasal dari penyebutan sebuah hutan Kunjarakenya yaitu desa yang berarti “ Daerah hutan gajah” yang dalam bahasa Jawa sekarang adalah

alasing liman. Kemudian dari *alas liman* tersebut sekarang berubah menjadi *Saliman*, akhirnya menjadi Sleman. Teori ini kemudian diperkuat dengan ditemukannya Prasasti Saliman IV yang berisi tentang Penetapan Perdikan Hutan Saliman (daerah Demangan) pada tahun Saka 802 (880 M) oleh pejabat yang bernama Sang Paugat Bolokas.

Selanjutnya dengan kembalinya Indonesia kepangkuan Republik Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949, maka UU no 22/1948 tentang Pemerintahan daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 1950. Untuk Kabupaten Sleman dikeluarkan Undang-Undang no. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian secara resmi legal Kabupaten Sleman menjadi kabupaten yang mempunyai urusan rumah tangga sendiri yang jelas.

Adapun para Bupati yang menjabat pada periode tahun 1950-2004 berturut-turut adalah :

1. KRT Diponingrat (1950-1955)
2. KRT Prawirodiningrat (1955-1957)
3. KRT Buchori S. Pranotodingrat (1957-1959) sebagai Kepala Daerah Swantara
4. KRT Murdaningrat (1959-1964)
5. KRT Tedjo Hadiningrat (1964 –1974)
6. KRT H. Prodjosuyoto (1974-1985)
7. Drs. Samirin (1985-1990)
8. Drs. H. Arifin Ilyas (1990-2000)

9. Drs Ibnu Subiyanto, Akt (2000-2004).
10. Drs. Ibnu Subiyanto, Akt (2004-2010)
11. Drs. Sri Purnomo, M.Si (2010-2015)

B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Dalam rencana pembangunan menengah di Kabupaten Sleman antara Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengukuhkan visi dan misi sebagai berikut

Visi

Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin tahun 2010

Penjelasan Visi :

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan

Misi :

1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lain.

2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya

tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

C. Lokasi, Geografis, dan Luas Wilayah

Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dari lima kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan menuju arah Semarang, Yogyakarta dan Solo. Kabupaten Sleman terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat ibukota propinsi. Daerah ini mudah dijangkau karena banyak angkutan umum baik angkutan darat maupun udara.

Wilayah kabupaten Sleman terbentang 110 ° 13' 00'' sampai dengan 110° 33' 00'' Bujur Timur dan mulai 7° 47' 03'' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara – Selatan 32 km. Timur-Barat 35 km. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574.820,00 ha atau 574.82 km², terdiri dari tujuh belas kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun

Tabel IV.1. Luas wilayah kecamatan

NO	Kecamatan	Banyaknya		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Kecamatan Moyudan	4	65	2.762
2	Kecamatan Godean	7	57	2.684
3	Kecamatan Minggir	5	68	2.727
4	Kecamatan Gamping	5	59	2.925

Tabel IV.1. Luas wilayah kecamatan (lanjutan)

5	Kecamatan Seyegan	5	59	2.925
6	Kecamatan Sleman	5	83	3.132
7	Kecamatan Ngaglik	6	87	3.852
8	Kecamatan Mlati	5	74	2.853
9	Kecamatan Tempel	8	98	3.249
10	Kecamatan Turi	4	54	4.309
11	Kecamatan Prambanan	6	68	4.135
12	Kecamatan Kalasan	4	80	3.584
13	Kecamatan Berbah	4	58	2.299
14	Kecamatan Ngemplak	5	82	3.571
15	Kecamatan Pakem	3	61	4.384
16	Kecamatan Depok	3	58	3.555
17	Kecamatan Cangkringan	5	73	4.799

Sumber : BPS

Secara administrasi Kabupaten Sleman berbatasan dengan kabupaten kabupaten lain. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

D. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Sleman sampai dengan bulan Mei tahun 2008 keseluruhan berjumlah 938.554 jiwa, dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 938.346 jiwa dengan komposisi 464.972 jiwa berkelamin laki-laki dan 473.365 jiwa berkelamin perempuan. Untuk jumlah Warga Negara Asing (WNA) sebesar 207 jiwa dengan komposisi 105 jiwa berkelamin laki-laki dan 102 jiwa berkelamin perempuan.

Tabel IV.2. Jumlah penduduk per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		WNI		Jumlah	WNA		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Gamping	37.958	38.131	76.089	4	1	0
2	Godean	30.928	31.218	62.146	0	0	0
3	Moyudan	17.224	18.070	35.294	0	0	0
4	Minggir	17.193	18.300	35.493	0	0	0
5	Seyegan	22.090	22.829	44.919	0	0	0
6	Mlati	37.490	37.648	75.138	0	0	0
7	Depok	63.106	58.782	121.888	95	97	192
8	Berbah	22.242	22.904	45.146	0	0	0
9	Prambanan	21.852	24.016	45.868	0	0	0
10	Kalasan	28.840	30.326	59.166	0	0	0
11	Ngemplak	24.725	25.559	50.284	0	0	0

Tabel IV.2. Jumlah penduduk per kecamatan (Lanjutan)

12	Ngaglik	38.595	38.650	77.245	0	1	1
13	Sleman	30.256	31.222	61.478	0	0	0
14	Tempel	24.927	26.108	50.945	0	0	0
15	Turi	17.404	17.879	35.282	0	0	0
16	Pakem	16.365	17.362	33.727	6	3	9
17	Cangkringan	13.777	14.461	28.238	0	0	0
	Jumlah	464.972	473.465	938.346	105	102	207

Sumber : kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil

Seperti diketahui jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu aset penting dan merupakan juga salah satu potensi dalam peningkatan pembangunan. Nampaknya apabila dicermati sungguh-sungguh pertambahan penduduk yang relatif cepat dapat mengakibatkan menjadi beban bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri, apabila tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang tinggi atau memadai. Oleh karena itu pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan di bidang kependudukan dengan cara memprioritaskan mobilitas pengendalian baik kualitas maupun kuantitas, sehingga akan lebih menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan daya dukung lingkungan yang kurang seimbang.

Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.479 orang/km².

E. Pendidikan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman nampaknya atau boleh dikatakan tergolong tinggi, karena akibat adanya migrasi masuk lebih besar apabila dibandingkan dengan migrasi yang keluar. Hal ini karena Sleman sebagai tujuan pendidikan dari daerah lain. Dalam hal ini fasilitas pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang dimiliki Kabupaten Sleman sangat menarik minat siswa dari luar daerah. Oleh karena itu setiap tahun banyak siswa yang datang untuk tujuan belajar ke Kabupaten Sleman.

Pengembangan pendidikan di Kabupaten Sleman diarahkan untuk mendukung keberadaan Sleman sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai kebijaksanaan dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman juga memperhatikan pengembangan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah. Pada jenjang TK pada tahun 2008/2009 memiliki sebanyak 499 unit sekolah yang terdiri

dari 345 TK negeri dan 149 TK swasta dengan jumlah kelas masing-masing 2.697 kelas untuk TK negeri dan 789 kelas untuk TK swasta.

Pada jenjang SD di Kabupaten Sleman memiliki gedung sebanyak 498 unit sekolah yang terdiri dari 382 SD negeri dan 117 SD swasta dengan jumlah kelas 2.668 kelas untuk SD negeri dan 896 kelas untuk SD swasta. Banyaknya guru SD yang mengajar di Kabupaten Sleman mencapai 4.177 orang di SD negeri dan 1.461 orang guru di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2008/2009 sebanyak 84.433 anak yang terbagi menjadi 64.710 anak yang bersekolah di SD negeri dan 19.723 anak yang bersekolah di SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 104 sekolah, yang terdiri dari 55 SMP negeri dan 49 SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat 2.777 orang, sebagian besar guru mengajar di SMP negeri yaitu sebanyak 1.848 orang, selebihnya mengajar di SMP swasta. Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2008/2009 mencapai 31.791 orang yang terdiri dari 23.804 orang di SMP negeri dan 8.987 orang di SMP swasta.

Untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu SMU, tersedia sebanyak 51 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 31 SMA swasta, sangat jelas terlihat bahwa peran sekolah swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih besar dibanding peran sekolah negeri. Tetapi jika dilihat dari banyaknya kelas terlihat berbalik. SMU swasta hanya memiliki 167 kelas dan SMU negeri memiliki 224 kelas. Banyaknya guru di SMU negeri 747 orang dan

banyaknya guru di SMU swasta 699 orang, dengan jumlah murid 7.792 orang untuk SMU negeri dan di SMU swasta sebanyak 3.884 orang.

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 50 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 42 sekolah dan 8 sekolah negeri. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu 1.247 orang dibandingkan dengan sebanyak 623 orang guru yang mengajar di SMK negeri. Murid yang mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan ini sebanyak 11.459 orang di SMK swasta dan 6.417 di SMK negeri.

Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas pendidikan tingkat tinggi baik swasta maupun negeri. Ada 35 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman 5 Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Akademi Angkatan Udara Adisucipto. Dan 30 Perguruan Tinggi Swasta diantaranya Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi '45, Universitas Atma Jaya, Universitas Sanata Dharma, UPN Veteran, dan beberapa Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik yang telah berdiri sampai tahun 2008.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan agar pertumbuhan perguruan tinggi di Sleman diarahkan untuk mendukung pengembangan daerah pedesaan dan perkotaan secara seimbang, sehingga pengembangan gedung-gedung untuk kampus diupayakan tidak dipusatkan disatu wilayah namun apabila memungkinkan setiap daerah yang dapat

dijangkau untuk pengembangan perguruan tinggi akan lebih baik masing-masing daerah mempunyai kesempatan untuk pengembangan daerahnya.

F. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sleman selalu mengalami perubahan, mungkin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi atau mungkin disebabkan rendahnya keahlian yang dimiliki oleh setiap individu sehingga akan mengalami perubahan matapencaharian.

Seperti diketahui di Kabupaten Sleman matapencaharian terbanyak pada sektor pertanian, hal ini dapat dimaklumi karena sesuai dengan kondisi geografisnya yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan tingkat ekonomi yang masih bersifat agraris. Oleh karena itu sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman adalah petani, baik sebagai petani baku dalam arti mempunyai tanah sendiri atau sebagai buruh tani yang dapat diperoleh dari menyewa atau diberi tetangga untuk menggarapnya dengan hasil yang dibagi secara adil dan tidak merugikan pihak buruh

Matapencaharian penduduk dari data pokok pembangunan Sleman yang diterbitkan oleh BAPPEDA Sleman tahun 2008 tercatat petani di Kabupaten Sleman 190.715 orang, industri/usaha 2.799 orang, pengrajin industri kecil 28.581 orang, buruh tani 24.313 orang, buruh industri 19.557 orang, buruh bangunan 24.256 orang, pertambangan 1.846 orang, perdagangan 23.650 orang, pengangkutan 6.818 orang, PNS 38.853 orang, ABRI 6.984 orang, dan pensiunan 12.898 orang

G. Agama dan Kepercayaan

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman sampai dengan Mei 2008 seluruhnya 949.774 jiwa, untuk yang beragama Islam 858.026 orang (90,34%), beragama Katolik 63.307 orang (6,66%), beragama Kristen dan Protestan 26.047 orang (2,74%), Hindu 1.489 orang (0,16%), dan beragama Budha 905 orang (0,10%).

Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman beragama Islam, namun sebagai orang Jawa atau masyarakat yang menempati didaerah pedesaan kadang-kadang secara penuh tidak dapat meninggalkan kepercayaan warisan dari para leluhurnya. Apabila kita cermati bersama sisa-sisa kepercayaan para leluhur boleh dikatakan belumlah hilang sama sekali karena pada umumnya mereka telah menghayati.

Masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Sleman pada khususnya masih percaya adanya alam gaib. Dalam ilmu antropologi terjadinya perkembangan kepercayaan baik pada makhluk halus maupun kepada hal gaib itu karena pengaruh dari keadaan atau lingkungan pada saat itu. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, bahwa semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas getaran jiwa yang bisa disebut emosi keagamaan. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.

H. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Tanaman pangan meliputi padi dan palawija, tanaman palawija meliputi tanaman jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta kacang hijau, adapun hortikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Produksi padi sawah di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 267.607 ton, tanaman palawija yang didominasi oleh tanaman jagung mencapai 30.890 ton, diikuti oleh produksi ubi kayu dan kacang tanah yang masing-masing 24.450 ton dan 5.490 ton sampai dengan tahun itu juga.

Produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 700.561 kuintal dan 83.694 kuintal. Kemudian diikuti oleh mendong (bahan baku tikar) dengan produksi 30.325 kuintal

Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan peternakan rakyat guna mendorong diversifikasi pakan dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur dan susu melalui kegiatan pemeliharaan ternak dan inseminasi buatan. Populasi ternak terbesar pada tahun 2008 terdiri dari sapi potong \pm 51.541 ekor, sapi perah \pm 5.465 ekor, kerbau \pm 3.387 ekor, dan kuda \pm 415 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil yang meliputi domba dengan populasi \pm 68.955 ekor, kambing \pm 35.075 ekor, dan babi \pm 4.519 ekor.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah. Berikut ini adalah kalsisifikasi dan perhitungan data mengenai besaran target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman dari Tahun 2005 hingga 2009. Penyajian data tersebut adalah langkah awal dan pedoman dalam proses menghitung besarnya kontribusi dan perbandingan per tahun Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sleman.

Tabel V.1. Terget dan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2005	16.260.600.000	17.185.835.745	925.235.745
2006	15.500.000.000	18.652.038.103	3.152.038.100
2007	20.500.000.000	25.705.707.427	5.205.707.420
2008	24.000.000.000	26.921.123.355	2.921.123.350
2009	27.200.000.000	31.190.111.489	3.990.111.480

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terget penerimaan pajak penerangan jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabubaten Sleman terus mengalami peningkatan dari tahun 2005-2009, kecuali pada tahun 2006 yang

mengalami penurunan target. Pada tahun 2005 target penerimaan mencapai Rp 16.260.600.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp17.185.835.745 pada tahun ini terjadi kenaikan target sebesar Rp925.235.745. Di tahun 2006 target penerimaan pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 15.500.000.000 dan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut sebesar 18.625.038.103 atau terjadi peningkatan dari yang dianggarkan sebesar Rp3.152.038.100. Tahun 2007 target penerimaan kembali naik menjadi Rp 20.500.000.000 dan realisasi penerimaan pendapatan pajak sebesar Rp25.705.707.427 atau terjadi peningkatan dari target sebesar Rp5.205.707.420, tahun 2007 adalah tahun dengan peningkatan pajak yang paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak penerangan jalan umum menjadi Rp 24.000.000.000, dan realisasi penerimaan sebesar Rp26.921.123.355 atau meningkat sebesar Rp2.921.123.350 dan Pada tahun 2009 target penerimaan kembali meningkat menjadi Rp 27.200.000.000 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp31.190.111.489 atau terjadi peningkatan dari yang dianggarkan sebesar Rp3.990.111.480. Dari data tersebut dapat pula dilihat bahwa selalu ada peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sleman.

Tampilan berikut ini merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan 2009

Tabel V.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2005	33.067.768.825	36.638.630.959	3.570.862.134
2006	32.750.000.000	37.979.313.374	5.229.313.376
2007	42.000.000.000	50.287.665.731	8.287.665.731
2008	49.171.622.443	61.020.899.130	11.849.276.687
2009	56.350.000.000	71.044.731.106	14.694.731.106

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan .

Pada tahun 2005 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 33.067.768.825 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 36.638.630.959, ada peningkatan dari target yang di anggarkan sebesar Rp 3.570.862.134. Tahun 2006 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 32.750.000.000 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 37.979.313.374, pada tahun ini juga terjadi peningkatan pendapatan dari yang ditargetkan sebesar Rp 5.229.313.374. Di tahun 2007 pemerintah daerah menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 42.000.000.000 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 50.287.665.731, di tahun ini terjadi peningkatan dari yang ditargetken sebesar Rp 8.287.665.731. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 49.171.622.443 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 61.020.899.130, ditahun 2008

kembali terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah dari yang ditargetkan sebesar Rp. 11.849.276.687.

Dan pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 56.350.000.000 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 71.044.731.106, kembali terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 14.694.731.106.

Dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009, pendapatan pajak daerah selalu mengalami peningkatan.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Terhadap Pajak Daerah

Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sleman, menggunakan rumusan sebagai berikut.

$$Kontribusi\ PPJU = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PPJU}{Realisasi\ penerimaan\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

a. Kontribusi pajak penerangan jalan umum pada tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{17.185.835.745}{36.638.630.959,38} \times 100\% \\ &= 46,90\% \end{aligned}$$

b. Kontribusi pajak penerangan jalan umum pada tahun 2006

$$= \frac{18.652.038.103}{37.979.313.374,32} \times 100\%$$

$$= 49,11 \%$$

c. Kontribusi pajak penerangan jalan umum pada tahun 2007

$$= \frac{25.705.707.427}{50.287.665.731} \times 100\%$$

$$= 51,11 \%$$

d. Kontribusi pajak penerangan jalan umum pada tahun 2008

$$= \frac{26.921.123.335}{61.020.899.130} \times 100\%$$

$$= 44,11 \%$$

e. Kontribusi pajak penerangan jalan umum pada tahun 2009

$$= \frac{31.190.111.489}{71.044.731.106} \times 100\%$$

$$= 43,90 \%$$

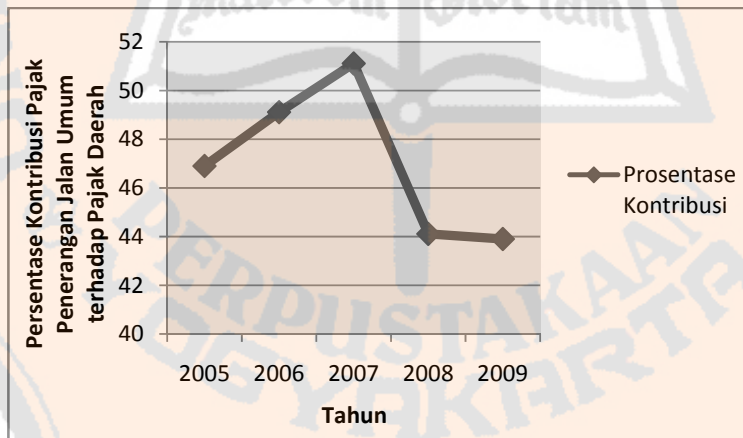
Dari Perhitungan diatas maka dapat di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel V.3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2009

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2005	17.185.835.745	36.638630.959	46,90
2006	18.652.038.103	37.979.313.374	49,11
2007	25.705.707.427	50.287.665.731	51,11
2008	26.921.123.335	61.020.899.130	44,11
2009	31.109.111.489	71.044.731.106	43,90
Rata-Rata			47,02

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah

Grafik V.1
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan umum terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 2005 – 2009 pada Kabupaten Sleman



Dari tampilan tabel V.3 dan Grafik V.1 dapat dilihat dan dipahami bahwa besarnya penerimaan pajak penerangan jalan umum Kabupaten Sleman Tahun 2005 - 2009 mengalami peningkatan. Namun kontribusi yang diberikan

mengalami pasang surut, penurunan kontribusi diakibatkan karena meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah yang lain.

Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Sleman berkisar antara 43,90 % sampai dengan 51,11 %. Pada tahun anggaran 2005 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 46,90 % terhadap pajak daerah. Pada tahun anggaran 2006 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 49,11 % atau meningkat sebesar 2,21 % terhadap pajak daerah. Pada Tahun anggaran 2007 kontribusi pajak penerangan jalan meningkat sebesar 51,11 % atau meningkat sebesar 2 % terhadap pajak daerah, peningkatan itu disebabkan karena adanya kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik). Banyak industri-industri yang sangat terpuak dengan kejadian ini, dan setelah kenaikan pada tahun 2007, banyak industri melakukan penghematan. Adapun kebijakan yang ditempuh perusahaan yaitu tidak selalu bergantung mutlak dengan listrik, dengan cara menggunakan tenaga alternatif walaupun penggunaan tenaga tersebut hanya memenuhi 20 % sampai 30 % dari total kebutuhan. Dan penghematan tersebut menuai hasil , itu terlihat dimana pada tahun anggaran 2008 dan 2009 kontribusi yang disumbangkan terhadap pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi 44,11 % dan 43,90 % atau mengalami penurunan sebesar 7 % dan 0,21 %.

2. Perbandingan dari tahun Penerimaan Pajak Penerangan jalan Umum di Kabupaten Sleman selama Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun 2009

Dalam memecahkan rumusan masalah yang kedua digunakan rumus Angka indeks berantai sebagai berikut:

$$\text{Angka Indeks PPJU} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun yang dicari}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan Perbandingan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

a. Angka Indeks PPJU Tahun 2005

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2005}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2005}} \times 100\% \\ & = \frac{17.185.835.745}{17.185.835.745} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

b. Angka Indeks PPJU Tahun 2006

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2006}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2005}} \times 100\% \\ & = \frac{18.652.038.103}{17.185.835.745} \times 100\% \\ & = 108\% \end{aligned}$$

c. Angka Indeks PPJU Tahun 2007

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2007}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2006}} \times 100\% \\
 & = \frac{25.705.707.427}{18.652.038.103} \times 100\% \\
 & = 137\%
 \end{aligned}$$

d. Angka Indeks PPJU Tahun 2008

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2008}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2007}} \times 100\% \\
 & = \frac{26.921.123.335}{25.705.707.427} \times 100\% \\
 & = 104\%
 \end{aligned}$$

e. Angka Indeks PPJU Tahun 2009

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2009}}{\text{Realisasi penerimaan PPJU tahun 2008}} \times 100\% \\
 & = \frac{31.190.111.489}{26.921.123.335} \times 100\% \\
 & = 115\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan angka indeks diatas maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.4. Angka Indeks Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum	Angka Indeks (%)
2005	17.185.835.745	100
2006	18.652.038.103	108
2007	25.705.707.427	137
2008	26.921.123.335	104
2009	31.190.111.489	115

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sleman berdasarkan perhitungan angka indeks, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005 sebagai tahun dasar diberi nilai sebesar 100 %, dengan anggapan tahun tersebut dalam keadaan normal. Ditahun 2006 meningkat menjadi 108 % atau meningkat sebesar 8 %. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 29 % menjadi 137 % adapun faktor penyebab kenaikan ini adalah adanya keputusan Pemerintah menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik), seperti pembahasan didepan sektor industri banyak yang terpukul, dan mencari tenaga penggunaan tenaga alternatif juga menuai hasil, Setelah tahun 2007 turun menjadi 104 % ditahun 2008 atau turun 33 % dan kembali naik ditahun 2009 menjadi 115 % atau naik sebesar 11 % dari tahun sebelumnya.

3. Prediksi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015

Untuk menjawab permasalahan terakhir, yaitu prediksi pendapatan PPJU Kabupaten Sleman, akan digunakan perhitungan dengan analisis *trend* dengan metode *Least Square's* (Jumlah Kuadrat Terkecil), dan persamaan garis yang digunakan adalah $Y' = a + b X$. Adapaun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam perhitungan garis *trend*, antara lain:

a. Menentukan nilai a dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y}{N}$$

Di mana :

a : Jumlah Y pada saat X=0

Y : Jumlah realisasi PPJU

N : Jumlah tahun yang akan diprediksi yaitu selama 5 tahun mulai tahun anggaran 2010 s/d tahun anggaran 2014

b. Menentukan nilai b dengan rumus

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Di mana

b = Jumlah naik / turun Y per tahun atau jumlah naik / turun PPJU per tahun

X = Jarak antar tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah

c. Menentukan persamaan garis *trend* dengan rumus

$$Y' = a + bX$$

Dimana

Y' = nilai *trend* Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

d. Melakukan peramalan dengan menggunakan garis trend pada langkah ketiga

Tabel V.5. Perhitungan *Trend* Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kabupaten Sleman data dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, menggunakan metode *Least Square's* (Jumlah Kuadrat Terkecil)

Tahun	Y	X	X ²	XY
	PPJU			PPJU
2005	17.185.835.745	-2	4	- 34.371.671.490
2006	18.652.038.103	-1	1	- 18.652.038.103
2007	25.705.707.427	0	0	0
2008	26.921.123.335	1	1	26.921.123.335
2009	31.190.111.489	2	4	62.380.222.978
Σ (Jumlah)	119.654.816.099	0	10	36.277.636.720

Sumber : Laporan realisasi anggaran, data diolah

a) **Prediksi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kabupaten Sleman dari Tahun anggaran 2010 sampai dengan Tahun anggaran 2015**

(1). menentukan nilai a

$$a = \frac{\Sigma Y}{N}$$

$$= \frac{119.654.816.099}{5}$$

$$= 23.930.963.219,8$$

(2). Menentukan nilai b

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$= \frac{36.277.636.720}{10}$$

$$= 3.627.763.672$$

(3). Menentukan persamaan garis trend

Berdasarkan hasil perhitungan nilai a dan b pada perhitungan (1) dan perhitungan (2), maka persamaan garis *trend* adalah sebagai berikut :

$$Y' = 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 X$$

(4). Melakukan perhitungan prediksi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kabupaten Sleman

Dari persamaan garis *trend* $Y' = 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 X$ maka dapat di hitung prediksi untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Prediksi Penerimaan PPJU Tahun 2010

$$Y' = 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 X$$

$$= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 (3)$$

$$= 34.814.254.235,8$$

Prediksi Penerimaan PPJU Tahun 2011

$$Y' = 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 X$$

$$= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 (4)$$

$$= 38.442.017.907,8$$

Prediksi Penerimaan PPJU Tahun 2012

$$\begin{aligned} Y' &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 \cdot X \\ &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 (5) \\ &= 42.069.781.579,8 \end{aligned}$$

Prediksi Penerimaan PPJU Tahun 2013

$$\begin{aligned} Y' &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 \cdot X \\ &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 (6) \\ &= 45.697.545.251,8 \end{aligned}$$

Prediksi Penerimaan PPJU Tahun 2014

$$\begin{aligned} Y' &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 \cdot X \\ &= 23.930.963.219,8 + 3.627.763.672 (7) \\ &= 49.325.308.928,8 \end{aligned}$$

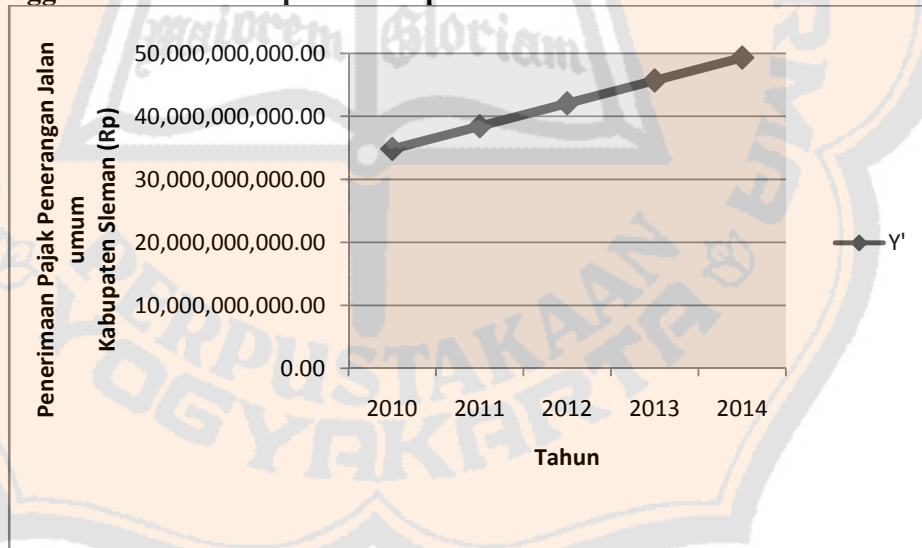
Dari hasil perhitungan prediksi penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014, maka dapat di disajikan dalam table sebagai berikut.

Tabel V.6. Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kabupaten Sleman antara tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014

Tahun	Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum
2010	34.814.254.235,8
2012	42.069.781.579,8
2013	45.697.545.251,8
2014	49.325.308.928,8

Sumber : data diolah

**Grafik V.2
Grafik Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan umum Tahun Anggaran 2005 – 2009 pada Kabupaten Sleman**



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 mengalami pasang dan surut, walaupun dalam keadaan seperti itu penerimaan pajak penerangan jalan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kontribusi terjadi antara tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2007. Di tahun 2005 kontribusi yang diberikan pada pajak daerah sebesar 46,90% dan meningkat sebesar 2,21% menjadi 49,11% di tahun 2006. Kenaikan kontribusi kembali terjadi di tahun 2007 dimana kontribusi yang diberikan terhadap pajak daerah mencapai 51,11% atau meningkat 2%. Tahun 2007 adalah peningkatan kontribusi yang paling tinggi antara tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2007 dimana faktor penyebabnya adanya kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Akibat dari kenaikan tarif dasar listrik banyak industri berusaha melakukan penghematan dengan tidak bergantung mutlak terhadap energi listrik melainkan mencari sumber energi alternatif, walaupun penggunaan tenaga tersebut hanya memenuhi 20 % sampai 30 % dari total kebutuhan industri.

2. Perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan umum dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuasi. Perbandingan masing-masing ditunjukkan oleh angka indeksnya yang berkisar 108% - 137% . Tahun 2005 adalah tahun dasar. Tahun 2006 angka indeks pajak penerangan jalan 108 % atau meningkat 8% dari tahun 2005 yang berarti pajak penerangan jalan umum mengalami kenaikan sebesar 8%. Pada tahun 2007 angka indeks meningkat sebesar 29% yang berarti bahwa pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar 29 % atau angka indeks menjadi 137%, seperti pembahasan di depan bahwa penyebab kenaikan ini adalah adanya kenaikan tarif dasar listrik. Setelah tahun 2007 angka indeks menurun sebesar 33% atau menjadi 104% yang memiliki maksud bahwa pajak penerangan jalan mengalami penurunan 33% pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 angka indeks kembali mengalami peningkatan sebesar 11% menjadi 115% dan memiliki arti bahwa pajak penerangan jalan umum tahun 2009 mengalami kenaikan 11%.
3. Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 prediksi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp34.814.254.235,8, tahun 2011 prediksi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp38.442.017.907,8, peramalan penerimaan pajak penerangan jalan untuk tahun 2012 sebesar Rp42.069.781.579,8, tahun 2013 diramalkan bahwa penerimaan pajak

penerangan jalan umum sebesar Rp45.697.545.251,8, dan untuk tahun 2014 prediksi penerimaan pajak penerangan jalan umum sebesar Rp49.325.308.928,8

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penulis hanya membandingkan kontribusi pajak penerangan jalan umum terhadap pajak daerah hanya 5 (lima) tahun saja, yaitu dari tahun 2005 hingga 2009.
2. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder (data yang dikumpulkan oleh pihak lain) bukan data primer (data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan oleh penulis sendiri).

C. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kantor DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Sleman, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran.

1. Semakin meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak penerangan jalan umum hendaknya hal tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga nantinya penerimaan dari pajak penerangan jalan dapat menjadi sumber Pendapatan dari pajak daerah dan akhirnya dapat menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga nantinya dapat digunakan dalam penyelenggaraan serta pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, jangka waktu tahun penelitian hendaknya ditambahkan sehingga hasil dari penelitian dapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, Nugroho (2007). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi. Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2004
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (2002). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2002. Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (2004). *Surat Keputusan Bupati Sleman No 56/SK.KDH/A/2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2002*
- Republik Indonesia (2000). *Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Saleh, Samsubar. 2004. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Wulansari, Aprilia. 2008. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta:USD

Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 2. Bandung: Penerbit Salemba Empat.





LAMPIRAN A

Lampiran ini berisi Surat Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 0479 / 2010

**TENTANG
 PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KD/II/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akutansi Fak Ekonomi UND Yogyakarta Nomor: 31/Kaprodi Akt./630/III/2010 Tanggal: 01 Maret 2010. Hal: Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : **BENEDICTUS B. AJI**
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 052114135
 Program/Tingkat : S I
 Instansi/Perguruan Tinggi : U S D Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta
 Alamat Rumah : Nirun RT 01 RW 20 Pendowoharo Sleman
 No. Telp/HP : 085643698443
 Untuk : Melakukan Penelitian Dengan Judul:
**"KONTRIBUSI PERKEMBANGAN DAN PREDISI PAJAK
 PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH"**
 Lokasi : BPKKD
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 03 Maret 2010 s/d
 03 Juni 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 03 Maret 2010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas Kab. Sleman
3. Ka. DPKKD Kab Sleman
4. Dekan FE- USD Yk
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
 Ka. Sub Bid. Litbang

Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MM.
 NIP. 19630112 198903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 2375 / 2010

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akutansi, Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 31/Kaprod. Man/550/XI/2010 Tanggal: 03 November 2010 Hal: Perpanjangan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **BENEDICTUS B. AJI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 052114135
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Alamat Rumah : Niron RT 01 / RW 20 Pendowoharjo Sleman
No. Telp/HP : 085643698443
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"KONTRIBUSI PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN DA
PREDIKSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAI
DAERAH "
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 05 November 2010 s/
05 Februari 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melah Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth:

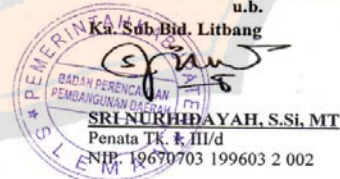
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. DPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Direktur PLN Kab. Sleman
6. Dekan FE-USD Yogyakarta
7. Pertinggal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 05 November 2010.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sdb. Bid. Litbang



SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamyia No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN

NO.: 070/479

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- 1. Nama : Benedictus Bromu Asri
- 2. No. Mahasiswa/DHP/NIM : 052114135
- 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
- 4. Universitas/Akademi : Universitas Senata Dharma
- 5. Dosen Pembimbing : Firma Sulistyawati, SE, Msi, G.P.A
- 6. Alamat Rumah Peneliti : Nirwan, Rt. 01. B.W. 020 Pandoyuharjo Sleman Yogyakarta 55512
- 7. No. Telp/HP : 085643698443
- 8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : BPKKD

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/ judul :

KONTRIBUSI PERKEMBANGAN DAN PREDIKSI PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
 Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam
 Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 3 Maret 2012

Yang menyatakan

Benedictus Bromu Asri
 (Nama Terang)



LAMPIRAN B

Lampiran ini berisi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pajak daerah dan Realisasi Penerimaan Pajak daerah 2005-2009

LAMPIRAN I : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2006

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
 SETELAH KONVERSI

URAIAN	(dalam rupiah)		
	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	110,80
Pendapatan Retribusi daerah	26.856.179.230,00	30.067.556.699,14	111,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.319.207.228,00	4.028.081.208,99	121,36
Lain-Lain PAD yang Sah	3.268.531.150,00	7.170.473.822,69	219,38
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	66.511.686.403,00	77.904.742.688,20	117,13
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-			
DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	34.500.000.000,00	46.327.501.211,00	134,28
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	319.515.978,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	363.239.000.000,00	375.386.017.189,00	103,34
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.210.000.000,00	41.504.702.845,84	128,86
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	400.000.000,00	523.182.140,00	130,80
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	128,88
Total Pendapatan Transfer	395.649.000.000,00	417.413.902.174,84	105,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	22.230.230.000,00	22.230.230.000,00	100,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	113,50
JUMLAH PENDAPATAN	484.590.916.403,00	520.548.874.863,04	107,42
BELANJA			
BELANJA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai	344.801.215.765,00	308.894.241.488,07	89,59
Belanja Barang	97.690.910.142,00	82.069.810.429,50	84,01
Bunga	186.005.000,00	160.029.473,10	86,03
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	9.636.190.021,00	8.818.928.177,00	91,23
Belanja Sosial	24.549.464.800,00	23.265.269.315,00	94,77
Jumlah Belanja Operasional	476.893.785.728,00	423.208.278.882,67	88,97
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	13.958.224.000,00	10.271.992.394,00	73,59
Belanja Peralatan dan Mesin	7.078.601.800,00	5.752.551.120,00	81,27
Belanja Gedung dan Bangunan	36.442.222.500,00	33.397.858.025,00	91,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.608.122.000,00	11.587.577.110,00	91,91
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.593.520.450,00	12.587.594.000,00	99,95
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	82.680.690.750,00	73.597.572.649,00	89,01

URAIAN	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja Tak terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja	562.178.914.491,00	497.305.851.531,67	88,65
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	10.658.363.400,00	10.256.982.000,00	96,23
Bagi Hasil Retribusi	152.500.000,00	116.710.226,50	76,53
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
Jumlah Transfer	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	573.589.777.891,00	508.279.543.758,17	88,81
SURPLUS/ DEFISIT	(88.998.861.488,00)	12.269.331.104,87	(15,57)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA			
Pinjaman Dalam Negeri	45.430.633.090,01	45.430.633.090,01	100,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	52.088.357.397,99	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	97.518.990.488,00	47.893.357.890,01	49,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.482.384.000,00	3.482.384.000,00	100,00
Penguatan Modal	4.900.000.000,00	4.853.000.000,00	99,04
Pembayaran Poko Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.745.000,00	137.744.928,40	100,00
Jumlah Pengeluaran	8.520.129.000,00	8.473.128.928,40	87,09
PEMBIAYAAN NETO	88.998.861.488,00	39.420.228.961,61	44,24
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANG - GARAN	0,00	51.689.560.066,48	0,00

Ctt:
Laporan Realisasi APBD tahun 2005 tidak diperbandingkan dengan Laporan Realisasi APBD tahun 2004, karena terdapat perbedaan format dengan laporan Realisasi APBD Tahun 2004 Auditan.



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR :
TANGGAL :

**LAPORAN REALISASI APBD SETELAH KONVERSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(AUDITAN)**

DRAJAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SELISIH	%
		Rp	Rp		
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	5.229.313.374,32	115,97	
Pendapatan Retribusi daerah	33.405.992.000,00	34.867.831.814,83	1.461.839.814,83	104,38	
Pendapatan dr Kekayaan yg dipisah	3.372.204.050,00	5.048.288.039,65	1.676.083.989,65	149,70	
Lain-Lain PAD yang Sah	6.284.124.280,00	12.814.661.888,60	6.550.537.608,60	204,57	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	14.917.774.787,40	119,68	
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	35.500.000.000,00	49.208.735.240,00	13.708.735.240,00	138,62	
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	302.636.208,00	302.636.208,00	0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Alokasi Umum	485.397.000.000,00	485.397.000.000,00	0,00	100,00	
Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.890.000.000,00	60.000.000,00	100,23	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	546.697.000.000,00	560.768.371.448,00	14.071.371.448,00	338,85	
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.800.000.000,00	49.531.420.688,89	17.731.420.688,89	155,76	
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.919.693.500,00	1.919.693.500,00	0,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	31.800.000.000,00	51.451.114.188,89	19.651.114.188,89	161,80	
Total Pendapatan Transfer	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	33.722.485.636,89	105,83	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	654.289.320.330,00	702.929.580.754,29	48.640.260.424,29	107,43	
BELANJA					
BELANJA OPERASIONAL					
Belanja Pegawai	427.336.430.419,00	370.635.197.303,86	(56.701.232.315,14)	86,73	
Belanja Barang	121.768.601.808,66	107.746.047.882,74	(14.022.553.924,92)	88,48	
Bunga	143.619.653,94	143.619.653,94	0,00	100,00	
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Sosial	37.037.050.200,00	34.050.335.606,00	(2.986.714.594,00)	91,94	
Jumlah Belanja Operasional	586.285.702.081,60	512.575.200.647,54	(73.710.501.434,06)	87,43	
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	8.254.062.500,00	2.320.424.892,00	(5.933.637.608,00)	28,11	
Belanja Peralatan dan Mesin	17.520.046.250,00	12.150.118.637,00	(5.369.927.613,00)	69,35	
Belanja Gedung dan Bangunan	60.423.574.390,00	50.609.104.970,01	(9.814.469.419,99)	83,76	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.599.040.550,00	14.310.185.299,00	(5.288.855.251,00)	73,01	
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.267.063.850,00	1.032.739.500,00	(6.234.324.350,00)	14,21	
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Modal	113.063.787.540,00	80.422.573.298,01	(32.641.214.241,99)	71,13	
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,71	
Jumlah Belanja Tak terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,71	
Jumlah Belanja	703.349.489.621,60	596.746.191.327,55	(106.603.298.294,05)	84,84	

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Hasil Pajak Dan Retribusi	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Jumlah Transfer	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	716.720.139.621,60	609.765.408.527,55	(106.954.731.094,05)	85,08
SURPLUS/DEFISIT	(62.430.819.291,60)	93.164.172.226,74	155.594.991.518,34	(149,23)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	51.689.560.066,48	51.691.306.850,48	1.746.784,00	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	20.079.004.150,52	0,00	(20.079.004.150,52)	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	71.768.564.217,00	51.691.306.850,48	(20.077.257.366,52)	72,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	100,00
Penguatan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.744.925,40	137.744.925,40	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran	9.337.744.925,40	9.337.744.925,40	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	62.430.819.291,60	42.353.561.925,08	(20.077.257.366,52)	67,84
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	135.517.734.151,82	135.517.734.151,82	

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO













LAMPIRAN C

Lampiran ini berisi tentang Penjabaran Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2005-2009

Penjabaran Laporan Realisasi dan Anggaran Pajak Penerangan Jalan Umum
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2005



